



Udara Kalsel Sangat Tidak Sehat

Sejumlah petugas gabungan berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (2/9/2026). Kualitas udara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan menunjukkan tanda "sangat tidak sehat" dengan polutan utama PM2.5 mencapai 164.9 µg/m³ pada Kamis (3/9/2029) pagi. Banjarbaru merupakan salah satu wilayah atau tiga besar di Kalsel yang mengalami kebakaran lahan terbanyak. (ist.ant)

KOPDES BELUM SEMUA JALAN, DANA DESA BAYAR CICILAN

Jatuh Tempo 28 September, Purbaya Siapkan Rp40 T

Pemerintah menyiapkan Rp40 triliun untuk membayar angsuran dan bunga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang jatuh tempo pada 27-28 September. Sumber dananya berasal dari Dana Desa. Diketahui program ini ditargetkan mencapai 80.000 koperasi. Namun, baru sekitar 11.000 unit yang dibangun. Bahkan yang sudah beroperasi baru sekitar 1.000. Target pemerintah sendiri, 40.000 koperasi sudah buka di akhir 2026. Diketahui total kredit dari bank-bank Himbara untuk pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, angkanya sekitar Rp240 triliun. Fasilitas itu diberikan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan KDKMP. DPR RI pun menyinggung soal koperasi yang belum beroperasi, tapi sudah harus mencicil pinjaman. Di sisi lain, 30.000 manajer KDKMP juga belum ditempatkan. Pendidikan dan pelatihan mereka sudah selesai, namun penempatan masih menunggu SK dari BP BUMN. BACA HAL 11...

5 PROVINSI DENGAN JUMLAH KOPERASI MERAH PUTIH TERBANYAK (PER 27 APRIL 2026)



Jawa Tengah

8.523 koperasi

Jawa Timur

8.493 koperasi

Aceh

6.535 koperasi

Sumatera Utara

6.128 koperasi

Jawa Barat

5.971 koperasi

Sumber: Kementerian Koperasi RI

5 PROVINSI DENGAN NILAI TRANSAKSI PER PROVINSI (DALAM MILIAR RUPIAH)

Jawa Timur
Rp70,4 miliarJawa Barat
Rp70,4 miliarSumatera Utara
Rp70,4 miliarJawa Tengah
Rp22,1 miliarSumatera Selatan
Rp22,1 miliarSumber: IMKOPDES Satgas KDKMP
Periode Data: Per 7 Agustus 2026

PRABOWO TAWARKAN 138 BLOK MIGAS, NUKLIR HINGGA PABRIK ALUMINIUM KE RUSIA

Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan Rusia. Bukan hanya perdagangan, pemerintah menawarkan kerja sama dari sektor energi, pangan, hilirisasi pertambangan, hingga industri strategis.

LAPORAN PERKEMBANGAN EKSPOR-IMPOR INDONESIA (2021-2025) (MILIAR USD)

2021

- Ekspor : **231,54**
- Impor : **196,20**
- Neraca Perdagangan : **+35,34**

2022

- Ekspor : **291,98**
- Impor : **237,45**
- Neraca Perdagangan : **+54,53**

2023

- Ekspor : **258,82**
- Impor : **221,89**
- Neraca Perdagangan : **+36,93**

2024

- Ekspor : **264,70**
- Impor : **233,66**
- Neraca Perdagangan : **+31,04**

2025

- Ekspor : **282,91**
- Impor : **241,86**
- Neraca Perdagangan : **+41,05**



Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum melakukan pertemuan di sela-sela Forum Ekonomi Timur (Eastern Economic Forum/EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026). (ist)

Kerja sama energi yang ditawarkan mencakup peningkatan produktivitas eksplorasi, produksi, dan pengolahan minyak serta gas, termasuk pengembangan kilang dan terminal penyimpanan gas. Prabowo juga membuka pintu bagi investasi Rusia di energi terbarukan, jaringan listrik pintar, dan pembangkit nuklir untuk tujuan damai.

"Kami mencari pengetahuan dan investasi dalam energi terbarukan, jaringan pintar, dan tenaga nuklir damai, termasuk teknologi modular dan skala penuh, di bawah standar keselamatan tertinggi dan pengamanan internasional," katanya.

Minat terhadap energi nuklir mendapat respons langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan bilateral dengan Prabowo di sela EEF, Putin menyebut energi nuklir sebagai salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam pengembangan hubungan kedua negara, bersama pertanian, pembangunan kapal, dan teknologi digital. Putin juga menyebut volume perdagangan Rusia-Indonesia naik 12 persen pada tahun lalu.

Hubungan tersebut, menurut Putin, memiliki fondasi politik yang kuat. "Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik. Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun," kata Putin.

Ia juga menyebut Komisi Bersama Rusia-Indonesia bidang ekonomi, perdagangan, dan kerja sama teknis terus bekerja, sementara kedua negara telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia.

Di sektor pangan, Prabowo melihat peluang kerja sama pada teknologi

pertanian, benih unggul, peternakan, mekanisasi pertanian, pengolahan makanan, serta produksi pupuk.

Bahkan pada hari yang sama, sebuah nota kesepahaman (MoU) ditandatangani perusahaan pupuk Indonesia dengan salah satu kelompok usaha besar Rusia untuk investasi bersama dalam proyek produksi pupuk berbahan baku gas di wilayah Timur Jauh Rusia. Prabowo belum merinci nama perusahaan maupun nilai investasinya.

Kerja sama hilirisasi juga mulai diarahkan pada komoditas tambang. Prabowo mengungkapkan UC Rusal, perusahaan aluminium asal Rusia, akan masuk besar-besaran ke Indonesia dan mengembangkan pabrik pengolahan aluminium bersama kelompok usaha Indonesia. "Rusal akan masuk secara besar-besaran ke Indonesia. Rusal akan mengembangkan pabrik pengolahan bersama dengan kelompok usaha Indonesia," kata Prabowo dalam dialog EEF.

Bagi Prabowo, hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah yang dapat dinikmati kedua negara. Karena itu, kerja sama tidak hanya diarahkan pada bahan mentah, tetapi juga produksi barang jadi seperti makanan, produk rumah tangga, pakaian, furnitur, farmasi, dan elektronik konsumen. "Kita harus menemukan nilai bersama," ujarnya. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama Rusia-Indonesia di bidang antariksa, pendidikan tinggi, dan transportasi.

Prabowo kemudian mengajak perusahaan Rusia menjadikan Indonesia sebagai basis produksi sekaligus pintu masuk ke pasar ASEAN dan Indo-Pasifik. "Oleh karena itu, saya katakan langsung kepada perusahaan-perusahaan Rusia, datanglah ke

Indonesia. Bekerja samalah dengan kami, berproduksilah bersama kami. Mari kita bangun industri bersama, mari kita ciptakan nilai bersama," katanya.

Dalam pertemuan dengan Putin, Prabowo juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara Pasifik. Ia mengatakan letak geografis kedua negara semestinya menjadi peluang ekonomi, bukan penghalang. "Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, Samudra Pasifik menghubungkan kita. Ini bukan tembok di antara kita, ini harus menjadi jalan raya antara kedua ekonomikita," ujar Prabowo.

Pemerintah kini menempatkan sektor energi sebagai salah satu arena utama untuk menerjemahkan hubungan strategis tersebut ke proyek konkret.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mendampingi Prabowo di Rusia mengatakan arahan Presiden adalah memastikan setiap kesepakatan di Vladivostok menghasilkan manfaat yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat. Dengan demikian, agenda RI-Rusia tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi diarahkan pada investasi, transfer teknologi, dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra strategis Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Pernyataan itu disampaikan saat Putin menjamu Presiden Prabowo Subianto dalam jamuan makan siang di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026), di sela agenda Eastern Economic Forum (EEF) ke-11.

"Indonesia merupakan salah satu mitra kunci bagi Rusia di kawasan Asia-Pasifik," kata Putin. Ia juga menyebut Indonesia sebagai salah satu sahabat Rusia yang terpercaya dalam kerangka ASEAN. "Jakarta dan Indonesia merupakan salah satu sahabat Rusia yang terpercaya dalam kerangka ASEAN," ujarnya.

Putin mengatakan hubungan Rusia dan Indonesia telah dibangun selama bertahun-tahun dan terus berkembang, termasuk melalui hubungan ekonomi dan perdagangan. Ia menyebut volume perdagangan kedua negara meningkat 12 persen pada tahun lalu.

Kerja sama juga dijalankan melalui Komisi Bersama Rusia-Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerja sama teknis. (gus,rtr,ist/dya)

PANAS RAPAT DPR-BGN: DARI PINDAH KANTOR HINGGA TARUHAN KERACUNAN MBG

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Kamis (3/9/2026) berlangsung panas. Selain menguliti rencana anggaran BGN 2027 dan status kantor lembaga tersebut, anggota DPR menyoroiti persoalan yang terus membayangi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yaitu keracunan makanan.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto bahkan menantang Kepala BGN Sudaryono untuk bertaruh bahwa kasus keracunan MBG akan kembali terjadi jika tata kelola program tidak dibenahi. Menurut Edy, persoalan keamanan pangan dalam program berskala nasional itu memiliki terlalu banyak variabel untuk diselesaikan hanya dengan pendekatan internal BGN.

"Variabelnya kompleks, enggak bisa dengan yakin bahwa keracunan (MBG) ini enggak akan terjadi lagi, sudahlah, taruhan sama saya."

Edy menilai BGN perlu melibatkan lebih banyak institusi dalam pelaksanaan MBG, terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pemerintah daerah. Ia mengkritik model pengelolaan yang menurutnya terlalu vertikal dan seragam, sementara program tersebut berhadapan dengan kondisi lapangan yang berbeda-beda. "Libatkan BPOM, libatkan pemerintah daerah, itu enggak dipenuhi, BGN ini mau main



sendiri vertikal seragam serentak," kata Edy.

Masalah lain berada pada sumber daya manusia pengelola dapur. Edy menyoroiti keterlibatan personel yang dinilainya belum memiliki latar belakang pengelolaan makanan siap saji, tetapi harus menangani produksi dalam jumlah besar. "SPPI muda-muda dipaksa, yang enggak punya background sama sekali mengelola

siap saji dengan volume dua ribu per hari, ini sulit, Pak," ujarnya.

Ia juga menyebut jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai sekitar 27.000 unit, jauh lebih banyak dibandingkan puskesmas yang disebutkan sekitar 10.280 unit.

Peringatan Edy muncul sehari setelah BGN mengungkapkan 512 orang di Pondok Pesantren Manbawl

Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi MBG. Dari jumlah itu, 80 orang masih menjalani perawatan, sedangkan 312 orang telah diperbolehkan pulang. BGN menyatakan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian.

Reuters juga melaporkan dapur yang diduga menjadi sumber makanan telah dikenai penghentian sementara selama 30 hari sembari menunggu hasil investigasi. (Reuters)

Edy menegaskan kritiknya bukan upaya menakut-nakuti BGN. Ia justru meminta Sudaryono menjadikan persoalan tersebut sebagai peringatan dalam masa awal kepemimpinannya. "Saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini menjadi warning semua," kata dia.

Edy menyatakan Komisi IX dan Fraksi PDIP akan mendukung BGN memperbaiki program, karena intervensi nutrisi untuk mengatasi malnutrisi dan stunting tetap menjadi agenda penting.

Di tengah sorotan terhadap keamanan pangan, rapat juga memperlihatkan besarnya ekspansi MBG pada 2027. Sudaryono memaparkan pagu BGN tahun depan mencapai Rp240,20 triliun. Dari jumlah itu, Rp232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, termasuk Rp232,50 triliun khusus program MBG. Sementara Rp7,33 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen, dengan sekitar Rp7 triliun di antaranya untuk gaji dan tunjangan pegawai.

Dengan anggaran tersebut, BGN menargetkan 72.464.886 penerima manfaat MBG pada 2027. Sebanyak 60.599.777 merupakan peserta didik mulai PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK sederajat, SLB hingga santri, dengan alokasi Rp198,96 triliun. Adapun 11.865.109 penerima lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran Rp33,54 triliun. Sudaryono mengatakan target 72,46 juta penerima itu bahkan melampaui basis target RPJMN 2027 yang ditetapkan sebanyak 64,94 juta orang.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Yahya Zaini ikut mempertanyakan status kantor BGN yang masih menyewa. Menurut dia, lembaga tersebut seharusnya mempertimbangkan pemanfaatan aset negara atau gedung milik BUMN untuk menekan biaya. (tinrls,kum,ant/dya)

Awal September Sudah 1.793 Korban di 4 Daerah

KASUS dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bermunculan di sejumlah daerah. Pada 3 September 2026, sedikitnya 1.793 orang dilaporkan terdampak dalam empat kejadian di Lasem, Rembang; Sidoarjo; Agam; dan Nganjuk. Angka tersebut merupakan akumulasi dari laporan terbaru masing-masing daerah.

Di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebanyak 777 orang, terdiri dari 752 siswa dan 25 guru, mengalami diare dan muntah setelah menyantap menu MBG pada Rabu (2/9).

Sebanyak 15 orang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala sekolah menyebut sebagian ayam bakar yang akan dibagikan ditemukan dalam kondisi berlendir. Operator dapur mengatakan makanan tersebut dimasak sekitar pukul 03.00 dan baru dikonsumsi sekitar pukul 12.00.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, jumlah korban terus bertambah berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan setempat. Hingga Kamis

sore, tercatat 730 orang terdampak, dengan rincian 23 orang rawat inap, 706 rawat jalan, dan satu orang masih dalam observasi.

Kepala Dinkes Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan sampel muntahan korban dan makanan telah diperiksa untuk mencari sumber kejadian. "Sebetulnya yang paling penting adalah bukan hasilnya itu. Yang paling penting adalah sikap kita bagaimana terkait kalau misalnya ini terbukti dari karena permasalahan produk olahannya atau bahannya," ujarnya.

Kepala BGN Sudaryono pada Kamis mengakui adanya kelalaian SPPG dalam kasus Sidoarjo. Menurut dia, persoalan berkaitan dengan proses produksi dan batas waktu konsumsi makanan. Dapur SPPG yang berkaitan dengan kasus tersebut kemudian dihentikan sementara sembari investigasi dilakukan.

Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu pekan.

Kasus berikutnya terjadi di Agam,

Sumatera Barat, dengan 237 siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG pada Rabu (2/9). Telur menjadi salah satu makanan yang dicurigai berkaitan dengan kejadian tersebut. Distribusi makanan kemudian dihentikan sementara di lokasi terdampak sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya.

Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, sebanyak 49 orang, terdiri dari 48 siswa dan seorang guru, mengalami gejala setelah menyantap menu MBG berupa nasi goreng, ayam suwir, dan tahu. Guru SMAN 3 Nganjuk Andi Joko Santoso mengatakan makanan tiba sekitar pukul 10.00 WIB dan sejumlah siswa mulai mengeluhkan kondisi tubuh beberapa jam kemudian. "Kemudian jam dua (14.00 WIB) lebih, kok ada yang mual, ada yang pusing, ada yang muntah," kata Andi. Para korban mendapat penanganan di Puskesmas Begadung, RSUD Nganjuk, dan RS Bhayangkara. (tin,ant/dya)

ORANG UTAN SEMPURNA MATI BUNTUT ASAP KEBAKARAN

Seekor orang utan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) bernama Sempurna mati setelah ditemukan dalam kondisi sangat lemah dan mengalami gangguan pernapasan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Satwa jantan dewasa itu diduga terdampak paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tak hanya itu, Sebanyak 11 orang utan dievakuasi dari sekolah hutan Jejak Pulang di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Dampak status darurat diaktifkan saat api kebakaran mulai merambat mendekati sekolah hutan.



Orangutan bernama Sempurna berhasil diselamatkan dari sebuah perkebunan kelapa sawit di Desa Kuala Satong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang berada di dekat kawasan terdampak kebakaran hutan, Minggu (30/8/2026). (REUTERS)

Sempurna ditemukan warga pada Minggu, 30 Agustus 2026, sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Sempurna, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara. Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat menyebut Sempurna ditemukan di dalam parit kering di area perkebunan kelapa sawit milik warga. Saat ditemukan, ia tidak mampu berdiri dan hanya dapat bergerak terbatas.

Laporan masyarakat kemudian ditindaklanjuti tim BKSDA Kalbar bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI). Sempurna mendapat pertolongan pertama berupa terapi oksigen dan cairan intravena. Sekitar pukul 11.30 WIB, ia dibawa ke pusat rehabilitasi YIARI untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun kondisinya terus memburuk. Sekitar pukul 14.00 WIB, napasnya semakin dangkal dan saturasi oksigen tidak lagi terdeteksi. Tim melakukan resusitasi jantung dan paru atau cardiopulmonary resuscitation (CPR), tetapi Sempurna dinyatakan mati pada pukul 15.20 WIB.

Untuk mencari faktor yang berkontribusi terhadap kematian, nekropsi dilakukan pada 1 September 2026. Hasilnya menunjukkan perubahan patologis pada sejumlah organ, terutama paru-paru, jantung, dan ginjal. Pada paru-paru ditemukan kongesti dan atelektasis parsial, terutama pada bagian kaudovertral kedua lobus paru. Berdasarkan riwayat klinis dan hasil pemeriksaan, perubahan pada paru-paru diduga berkaitan dengan paparan asap yang mengganggu fungsi paru dan memicu hipoksia akut atau kekurangan oksigen dalam tubuh. Kondisi itu kemudian diduga berkontribusi terhadap gangguan fungsi kardiovaskular hingga menyebabkan kematian.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Dameria Pane menyatakan pihaknya menyayangkan Sempurna tidak dapat diselamatkan. Menurut dia, tim bergerak setelah menerima laporan warga dan memberikan penanganan medis sesuai kondisi satwa. Pemeriksaan lanjutan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta faktor yang diduga berkontribusi terhadap kematian

Sempurna.

"Kami sangat menyayangkan Sempurna tidak dapat diselamatkan. Sejak menerima laporan dari masyarakat, tim BKSDA Kalimantan Barat bersama YIARI segera melakukan evakuasi dan memberikan penanganan medis sesuai dengan kondisi satwa. Pemeriksaan lebih lanjut juga dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta faktor yang diduga berkontribusi terhadap kematiannya," kata Murlan, Kamis (3/9/2026).

Kematian Sempurna memperlihatkan bagaimana karhutla tidak hanya mengancam manusia, tetapi juga satwa yang kehilangan

ruang hidup dan terpapar asap. Pada akhir Agustus, kondisi kebakaran di Kalimantan memang masih dinamis. Kementerian Kehutanan mencatat hingga 30 Agustus pukul 21.02 WIB terdapat 946 hotspot berkepercayaan tinggi secara nasional, dengan 455 titik di Kalimantan Barat dan 308 titik di Kalimantan Tengah.

Data yang dihimpun WALHI sebelumnya menunjukkan skala ancaman yang lebih luas. Sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026, terdapat 118.420 hotspot di Indonesia dengan luas indikatif karhutla mencapai 107.649 hektare. Kalimantan menyumbang 34.262 hotspot dengan luas indikatif 33.837 hektare, sedangkan Kalimantan Barat mencatat 17.236 hotspot dan luas indikatif 28.680 hektare.

Tekanan terhadap satwa juga terjadi di Kalimantan Timur. Sebanyak 11 orang utan yang sedang menjalani rehabilitasi di Sekolah Hutan Jejak Pulang, KHDTK Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dievakuasi setelah karhutla mendekati kawasan tersebut. Status darurat diaktifkan pada 1 September 2026 pukul 16.00 WITA karena asap pekat dan kobaran api mulai mengancam sekolah hutan.

Sebelas orang utan tersebut terdiri dari enam jantan dan lima betina, berusia sekitar 6 hingga 15 tahun. Mereka kini ditempatkan di 12 kandang evakuasi. Secara kesehatan, belum ditemukan gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), demam, atau pilek. Namun dokter hewan Jejak Pulang, drh Tetri Regilya, mengatakan dampak kesehatan tidak selalu muncul seketika sehingga kondisi mereka tetap diobservasi.

"Kita perlu observasi lebih dalam lagi karena gejala itu enggak bisa kayak hari pertama dia langsung ketahuan. Bisa jadi kayak seminggu setelah pindah dari hutan ke kandang itu baru kelihatan," ujar Tetri.

Masalah lain muncul setelah satwa dipindahkan dari lingkungan hutan ke kandang. Head of Orangutan Care Jejak Pulang Siti Nur Badriyah mengatakan orang utan mulai menunjukkan kebosanan karena ruang gerak dan stimulasi mereka menjadi jauh lebih terbatas dibandingkan ketika berada di sekolah hutan. (wid,ist,kum/dya)



SAKSI UNGKAP USD75 RIBU DAN JEJAK KUOTA HAJI 50:50 DI ERA YAQUT

Persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis (3/9/2026), mempertemukan dua bagian penting dalam perkara tersebut. Di satu sisi, mantan pejabat Kementerian Agama mengungkap proses penetapan kuota tambahan 20 ribu jemaah yang dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus. Di sisi lain, staf biro perjalanan mengaku menyerahkan uang USD75 ribu kepada mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas setelah perusahaannya memperoleh tambahan kuota haji khusus.

Staf operasional Biro Travel Pesona Mozaik, Nur Faidzin alias Nanang, mengatakan uang itu diberikan kepada Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mantan staf khusus Yaqut. Jika dikonversikan menggunakan kurs Rp17.660 per dolar AS, jumlah tersebut setara sekitar Rp1,32 miliar. Nanang mengakui pemberian dilakukan dua kali, yakni USD40 ribu pada April 2023 dan USD35 ribu pada Juli 2024. Kedua penyerahan disebut berlangsung di kediaman Gus Alex di Sawangan, Depok.

Nanang menjelaskan pemberian itu bermula dari upayanya mencari informasi mengenai cara memperoleh kuota haji tambahan. Ia mengaku tidak memahami struktur birokrasi Kementerian Agama sehingga meminta bantuan Gus Alex, yang dikenalnya melalui seorang teman sesama alumni Yogyakarta. Menurut Nanang, Gus Alex kemudian memberinya nomor Rizky Fisa Abadi, yang saat itu menjabat Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus.

"Saya sebetulnya tidak ahli dalam hal perhajian Pak, karena bagian saya waktu itu mengurus perbankan di kantor. Kita paham, kita tahu ada berita tentang tambahan kuota, kuota haji khusus," kata Nanang di persidangan.

Setelah memperoleh nomor tersebut, Nanang menghubungi Rizky dan bertemu untuk membicarakan mekanisme memperoleh tambahan kuota. Beberapa hari kemudian, menurut dia, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mengenai pengajuan nama untuk kuota tambahan. Pengajuan



Eks Ketua Umum Pengurus Besar Nahdliatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya terlihat hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).ist

kemudian dilakukan melalui surat elektronik dan sebagian dinyatakan lolos.

Pesona Mozaik, kata Nanang, kemudian memperoleh 104 kuota tambahan haji khusus. Jaksa menunjukkan daftar penerima yang disebut memuat 104 nama dan meminta konfirmasi kepada Nanang. "Ini kan di data kami saudara merinci nomor satu nomor porsinya Dedi Uyo sampai dengan nomor 104 atas nama Muhammad Khaisan Ilyas?" tanya jaksa. "Oke baik Pak, iya," jawab Nanang.

Nanang menyebut uang yang diberikan kepada Gus Alex merupakan bentuk "terima kasih" setelah memperoleh kuota. Ia mengatakan uang tersebut bahkan tidak disampaikan secara terang-terangan sebagai pemberian. "Ya udah sampaikan aja terima kasih," ujar Nanang, menjelaskan keputusan dirinya dan manajemen perusahaan setelah mendapatkan tambahan kuota. Ia mengatakan uang dimasukkan ke dalam makanan ketika diserahkan kepada Gus Alex.

Keterangan Nanang muncul bersamaan dengan kesaksian mantan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama periode 2021-2024, Ahmad Bahiej. Dalam persidangan, Bahiej mengungkap bahwa KMA Nomor 1156 Tahun 2023 yang menjadi dasar pembagian kuota tambahan 2024 tidak didahului kajian hukum internal mengenai komposisi 50:50.

Bahiej mengonfirmasi keterangan dalam berita acara pemeriksaannya bahwa tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur pembagian kuota tambahan 20 ribu dengan komposisi 50 persen untuk jemaah reguler dan 50 persen untuk jemaah haji khusus. Ia mengaku baru mengetahui pembagian tersebut setelah rapat Zoom pada Januari 2024. Prosesnya, kata dia, berlangsung dalam kondisi ada perintah percepatan sehingga Biro Hukum tidak melakukan telaah sebagaimana mestinya.

Bahiej juga menyebut penanggalan KMA 1156 diminta dibuat mundur atau backdate. Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani mengonfirmasi keterangan Bahiej dalam BAP bahwa penanggalan KMA tersebut diminta oleh pihak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dengan alasan menyesuaikan timeline mereka.

"Terkait poin ini, apakah ini memang benar keterangan Saudara, itu bahwa 'seingat saya di internal biro tidak ada pembahasan atau kajian terkait KMA 1156 mengenai pembahasan kuota tambahan haji khusus sebanyak 50:50 persen. Pada

proses penanggalan KMA 1156 tahun 2023 diminta untuk di-backdate oleh pihak Dirjen PHU dengan alasan timeline dari pihak Dirjen PHU'?" tanya hakim.

"Iya," jawab Bahiej.

Kesaksian Bahiej juga membuka persoalan lain yaitu dasar pembagian kuota tambahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Menurut dia, undang-undang tersebut mengatur pembagian kuota nasional awal sebesar 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, tetapi tidak menjelaskan secara terang pembagian kuota tambahan.

"Ya, kalau di dalam Undang-Undang 8/2019 bahwa kuota nasional, kuota awal, itu dibagi 92 persen dan 8 persen. Kemudian ada kuota tambahan yang di sana tidak ada, tidak ada apa namanya," kata Bahiej.

Ketika jaksa memastikan apakah aturan pembagian kuota tambahan memang tidak diatur secara jelas, Bahiej menjawab, "Ya, tidak terang benderang membagi kuota itu."

Dalam perkara yang sama, Bahiej menjelaskan substansi KMA Nomor 1156 Tahun 2023 yang mengatur tambahan kuota untuk pelaksanaan haji 2024. Menurut dia, draf KMA membagi tambahan 20 ribu kuota secara 50:50, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

"Diatur bahwa di dalam draf KMA itu kuota tambahannya dibagi 50 persen-50 persen," ujar Bahiej.

Ketika jaksa mengonfirmasi apakah pembagian itu berarti 10 ribu kuota reguler dan 10 ribu kuota khusus, Bahiej menjawab singkat, "Ya."

Jaksa KPK juga memutar rekaman rapat daring Kementerian Agama era Yaqut. Dalam rekaman tersebut, Deni Sefianto, yang saat itu merupakan staf Kemenag, menjelaskan adanya perubahan norma mengenai pemanfaatan sisa kuota petugas haji khusus. Dalam rekaman, disebut tambahan kuota haji khusus berjumlah 922 jemaah, sementara kuota petugas berjumlah 10 ribu. Deni menyebut norma yang sebelumnya memberikan kewenangan kepada Menteri Agama atas sisa kuota dihapus dan diganti dengan ketentuan bahwa sisa kuota petugas dapat diberikan kepada jemaah. (wid,ist,kum/dya)



Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas disebut marah dalam rapat terkait Pansus Haji 2024. Itu diungkap saat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).ist. (Ist.ant)

Capaian CKG di Malang Baru 26%, Puskesmas Jemput Bola

MALANG - Realisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Malang hingga Agustus 2026 baru sekitar 26 persen. Untuk mengejar capaian tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang melalui Puskesmas akan jemput bola, mulai dari sekolah hingga pondok pesantren.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, mengatakan capaian tersebut masih berada di bawah target nasional CKG tahun kedua yang ditetapkan sebesar 46 persen.

"Program CKG di tahun kedua ini sesuai target nasional harus mencapai 46 persen dari jumlah orang yang harus di-CKG," ujar Wiyanto, Kamis (3/9/2026).

Dijelaskannya, capaian CKG pada 2025 berada di kisaran 30 persen. Sementara pada periode Januari hingga Agustus 2026, pelaksanaan CKG baru mencapai sekitar 26 persen.

Meski demikian, Wiyanto mengaku optimistis capaian tersebut masih dapat dikejar hingga akhir 2026. Pihaknya berharap realisasi CKG nantinya tidak hanya

memenuhi target nasional, tetapi bahkan dapat melampauinya. "Kami berharap sampai di 2026 akhir nanti bisa melampaui target nasional," katanya.

Untuk mengejar target tersebut, Dinkes terus mendorong setiap puskesmas agar meningkatkan pelaksanaan CKG. Evaluasi capaian dilakukan setiap bulan untuk melihat puskesmas yang telah memenuhi target maupun yang masih membutuhkan peningkatan.

Menurut Wiyanto, jumlah pemeriksaan yang mampu dilakukan masing-masing puskesmas dapat berbeda-beda. Salah satu faktor yang memengaruhi, yakni jumlah penduduk yang menjadi sasaran pemeriksaan di wilayah kerja masing-masing puskesmas.

Ia mencontohkan wilayah Poncokusumo yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Kondisi serupa juga terdapat di Sumberpucung dan Donomulyo sehingga jumlah sasaran CKG di wilayah tersebut juga relatif besar.

Namun, pelaksanaan CKG tidak lepas dari sejumlah kendala. Salah

satunya adalah waktu masyarakat yang sebagian besar digunakan untuk bekerja pada pagi hingga sore hari. Kondisi tersebut membuat sebagian warga baru memiliki waktu untuk mengikuti pemeriksaan pada malam hari.

Karena itu, Wiyanto menegaskan puskesmas perlu lebih aktif melakukan upaya jemput bola agar masyarakat yang belum menjalani pemeriksaan tetap dapat dijangkau.

"Pokoknya puskesmas harus mempunyai target satu hari pemeriksaan bisa berapa. Mungkin kalau targetnya 200, maka tenaga kesehatannya digerakkan, bagaimanapun caranya. Kalau hari ini hanya 180, berarti besoknya harus 220," katanya.

Ia menekankan, angka 200



Ilustrasi: Tenaga medis melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) kepada seorang warga di Puskesmas Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. (foto: Dinkes Kab. Malang)

pemeriksaan per hari bukan merupakan target yang ditetapkan Dinkes Kabupaten Malang secara seragam untuk seluruh puskesmas. Target tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing puskesmas serta jumlah penduduk yang menjadi sasaran CKG di wilayahnya. (Santi/Dya)

DPRD Kota Malang Segera Gelar Rakor terkait Relokasi Pasar Gadang



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (Santi/Lentera)

MALANG - DPRD Kota Malang segera menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan komisi dan stakeholder terkait relokasi pedagang Pasar Gadang. Ini akan menjadi forum untuk memperjelas persiapan pemerintah.

"Prinsipnya kami sudah membahas itu (berbagai persoalan yang menjadi sorotan dewan terkait Pasar Gadang). Nanti memang perlu diadakan rapat

koordinasi antara komisi bersama dengan stakeholder terkait," ujar Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Kamis (3/9/2026).

Untuk diketahui, persoalan tersebut berkaitan dengan penggunaan 2 lahan dalam pembangunan pasar relokasi, yakni lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan lahan sewa. Untuk lahan sewa, Pemkot Malang disebut menanggung biaya sewa

selama tiga tahun untuk pedagang, sementara pembangunan pasar relokasi dilakukan secara swadaya oleh para pedagang.

Namun, skema tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pemanfaatan lahan dan bangunan pasar setelah masa sewa berakhir.

Terlebih, fraksi DPRD Kota Malang sebelumnya menyoroti belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pedagang dan Pemkot Malang terkait pemanfaatan lahan milik pemkot maupun lahan sewa yang biaya sewanya ditanggung pemkot.

Oleh karena itu, menurut Amithya, pelaksanaan rakor nantinya akan menjadi ruang untuk membeberkan secara lebih rinci hal-hal yang perlu disiapkan pemerintah dalam proses relokasi. Terlebih, proses pemindahan pedagang sudah berjalan sehingga pembahasan yang dilakukan DPRD diarahkan untuk memperjelas tahapan selanjutnya.

"Pastinya ini menjadi atensi karena kami adalah wajah pemerintahan daerah Kota Malang. Kami akan adakan rakor itu. Di sana akan dibeberkan semuanya, apa yang perlu pemerintah siapkan," katanya. Di sisi lain, DPRD tidak ingin pembahasan tersebut justru menghambat progres penataan Pasar Gadang. Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, proses pembahasan dapat

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan relokasi yang masih berjalan hingga saat ini.

"Sebenarnya kalau menurut saya dibahas secara paralel masih bisa. Bukan dibahas di belakang, tetapi paralel. Sehingga progres itu sudah ada, kami memulai itu sudah ada," jelasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah adanya tenggat bagi pedagang yang masih belum membongkar lapaknya. Batas waktu pembongkaran disebut jatuh pada 15 September mendatang.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini mengatakan, DPRD masih memiliki sejumlah agenda pada pekan depan, termasuk rapat kerja bersama. Karena itu, rakor khusus yang membahas relokasi Pasar Gadang kemungkinan segera digelar setelah rangkaian agenda tersebut.

"Karena minggu depan teman-teman dewan masih akan mengadakan rapat kerja bersama. Mungkin di beberapa waktu setelah itu," tuturnya. (Santi/Dya)

Foto udara ini memperlihatkan seorang warga desa berjalan melintasi sawah yang mengering dengan tanah retak akibat musim kemarau panjang di Desa Wening Galih, Bogor, Jawa Barat, pada 28 Agustus 2026. (ist.a/fp)



PBB PERINGATKAN EL NINO SANGAT KUAT HINGGA 2027

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan El Nino yang kini telah terbentuk kuat di Samudra Pasifik akan terus menguat dalam beberapa bulan ke depan. Fenomena iklim ini diperkirakan mencapai intensitas sangat kuat menjelang akhir 2026 dan bertahan setidaknya hingga Februari 2027. Dampaknya bukan sekadar perubahan cuaca, tetapi berpotensi menjalar menjadi krisis pangan, kekeringan, banjir, gelombang panas, kebakaran hutan, hingga gangguan ekonomi di berbagai belahan dunia.

Dalam pembaruan El Nino/La Niña yang dirilis 3 September 2026, WMO menyatakan peluang El Niño bertahan hingga Februari 2027 mendekati 100 persen. Organisasi tersebut menyebut tingkat kepastian itu sebagai yang paling tegas dalam sejarah pembaruan El Niño/La Niña mereka. Kondisi laut Pasifik tropis yang luar biasa hangat menjadi bahan bakar utama penguatan fenomena tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan dunia sedang memasuki situasi yang belum pernah dipetakan sebelumnya. "El Niño semakin membesar di depan mata kita. Ilmu pengetahuan tidak menyisakan ruang untuk keraguan, planet ini berada di wilayah yang belum dipetakan, dan wilayah tersebut semakin memanas," kata Guterres. Ia menambahkan, "Suhu permukaan laut meningkat, suhu terus naik, dan dunia berada di zona bahaya cuaca ekstrem."

Kekhawatiran itu beralasan. Suhu permukaan laut di kawasan Pasifik khatulistiwa tengah dan timur terus meningkat. WMO mencatat anomali suhu Niño 3.4 telah bergerak dari sekitar 1,5 derajat Celsius di atas normal pada Mei-Juli menjadi sekitar 2,2-2,6 derajat Celsius pada pertengahan Agustus. Suhu bawah permukaan laut di sejumlah titik bahkan tercatat lebih dari 8 derajat Celsius di atas rata-rata. El Nino diperkirakan mencapai puncak menjelang akhir tahun sebelum pengaruhnya berlanjut hingga 2027.

Dampaknya tidak akan seragam di setiap negara. WMO menegaskan kekuatan El Niño semata tidak menentukan tingkat keparahan dampak di suatu wilayah karena pengaruhnya bergantung pada lokasi, musim, serta interaksi dengan fenomena iklim lain. Untuk September-November 2026, model WMO memperkirakan peluang suhu di atas normal meningkat di hampir seluruh wilayah daratan dunia. Pola curah hujan juga menunjukkan respons khas El Niño, dengan sebagian kawasan menghadapi peningkatan risiko kekeringan sementara kawasan lain berpotensi mengalami hujan ekstrem.

Sektor pangan menjadi salah satu titik rawan. Organisasi Pangan Dunia (WFP) memperkirakan El Niño 2026-2027 dapat mendorong sedikitnya 49 juta orang tambahan ke dalam kondisi rawan pangan akut di 45 negara hingga akhir 2027.

Dengan demikian, angka yang kerap disebut sekitar 50 juta bukan jumlah seluruh penduduk dunia yang akan kelaparan, melainkan tambahan orang yang diproyeksikan masuk kategori kerawanan pangan akut akibat guncangan iklim dan faktor lain. WFP menyebut El Niño dapat merusak

tanaman, ternak, dan infrastruktur sekaligus mengganggu pasar; ketika pasokan turun, harga pangan dapat meningkat dan semakin sulit dijangkau kelompok rentan.

Ancaman tersebut sudah diterjemahkan sejumlah negara menjadi kebijakan darurat. Peru, misalnya, menetapkan status darurat selama 60 hari di 893 distrik yang tersebar di 23 wilayah untuk mengantisipasi ancaman hujan lebat yang berkaitan dengan El Niño. Pemerintah Peru menilai risiko curah hujan ekstrem dalam beberapa bulan mendatang cukup tinggi sehingga membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, daerah, lembaga pertahanan sipil, serta kementerian dan institusi terkait.

Keputusan Peru menunjukkan paradoks El Niño: fenomena yang membawa kekeringan di satu tempat dapat menghasilkan hujan ekstrem dan banjir di tempat lain. Pemerintah Peru bahkan menyatakan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman telah terlampaui sehingga diperlukan dukungan operasional dan teknis dari pemerintah pusat.

Status darurat tersebut dimaksudkan agar penanganan bencana hidrometeorologi dapat dilakukan lebih cepat sesuai perkembangan dilapangan.

WMO mengingatkan dampak El Niño juga dapat berlangsung setelah fenomena tersebut melewati

puncaknya. Kepala WMO Celeste Saulo mengatakan, panas yang tersimpan di lautan dan kemudian dilepaskan ke atmosfer dapat menimbulkan konsekuensi panjang terhadap masyarakat dan ekonomi. "Fenomena El Nino yang luar biasa ini berpotensi memberikan pukulan telak bagi masyarakat dan perekonomian di seluruh dunia," kata Saulo. "Kita sudah melihat gangguan dan kerusakan akibat kekeringan dan banjir, dan kita memperkirakan dampak ini akan meningkat seiring intensifikasi El Nino. Tidak ada waktu untuk disia-siakan dalam bersiap-siap," ujarnya.

WFP pun mendorong pendekatan yang sama: bertindak sebelum bencana terjadi. Sejak Mei 2026, lembaga tersebut telah mengaktifkan rencana antisipasi di Chad, El Salvador, Guatemala, Mauritania, Sudan Selatan, dan Uganda. Lebih dari 14 juta dolar AS telah disalurkan untuk membantu sekitar 500.000 orang menghadapi potensi guncangan El Niño. WFP menyebut pengalaman sebelumnya menunjukkan setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan dalam tindakan antisipatif dapat menghemat sekitar 3-7 dolar AS dalam kerugian dan biaya respons.

Badan-badan PBB juga tidak melihat ancaman ini sebagai persoalan cuaca semata. FAO dan WFP sebelumnya telah mengajukan kebutuhan pendanaan untuk

melindungi hampir sembilan juta orang di 22 negara berisiko tinggi. Bantuan tersebut mencakup uang tunai, benih tahan kekeringan atau banjir, perlindungan ternak, sistem penampungan air, infrastruktur perlindungan banjir, informasi pertanian, dan sistem peringatan dini. Situasi menjadi lebih rumit karena El Niño 2026-2027 berlangsung di tengah planet yang sudah mengalami pemanasan akibat perubahan iklim.

Sejumlah pakar industri mineral dan batu bara (minerba) memprediksi fenomena El Niño berpotensi mengganggu aktivitas ekspor batu bara dari Kalimantan dan mendorong kenaikan harga komoditas tersebut. Tekanan terhadap pasokan ekspor ini terjadi ketika pemerintah juga memangkas kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 menjadi sekitar 600 juta ton.

Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai harga batu bara saat ini bergerak dalam tren positif setelah pemerintah mengumumkan pemangkasan kuota produksi tersebut. Menurut dia, gangguan ekspor akibat kondisi sungai yang terdampak El Niño berpotensi semakin menopang harga batu bara Indonesia, meski kenaikannya diperkirakan tidak akan terlalu tajam. (gus,rtr,wmo/dya)

TAK HARUS 8 JAM, BERAPA LAMA ORANG DEWASA PERLU TIDUR?

Selama bertahun-tahun, angka delapan jam seolah menjadi patokan universal untuk tidur malam. Tidak cukup delapan jam, seseorang kerap merasa tidurnya kurang. Sebaliknya, tidur lebih lama dianggap sebagai tanda tubuh membutuhkan istirahat ekstra.

Namun, anggapan bahwa setiap orang dewasa harus tidur tepat delapan jam setiap malam kini kembali dipertanyakan. Sebuah ulasan terbaru yang diterbitkan dalam *Brain Medicine* pada Agustus 2026 menyoroti bahwa kebutuhan tidur manusia jauh lebih fleksibel dibandingkan anggapan yang selama ini berkembang.

Para peneliti menyebut pola tidur masyarakat praindustri menunjukkan fleksibilitas yang cukup besar. Kondisi itu menunjukkan bahwa kebiasaan tidur malam secara teratur dalam durasi tertentu bukan sesuatu yang sepenuhnya bersifat tetap secara evolusioner.

Artinya, delapan jam bukan angka sakral yang harus dicapai setiap orang. Kebutuhan tidur dipengaruhi banyak faktor, mulai dari usia, kondisi kesehatan, aktivitas fisik, lingkungan, hingga faktor biologis dan kebiasaan seseorang. Tetapi, temuan tersebut juga tidak boleh dimaknai bahwa tidur lima atau enam jam setiap malam sudah pasti cukup.

Angka delapan jam sebenarnya telah lama melekat dalam budaya modern. Gagasan membagi sehari menjadi delapan jam bekerja, delapan jam rekreasi, dan delapan jam tidur berkembang sejak era industrialisasi.

Belajar dari Pemburu

Salah satu penelitian yang banyak menjadi rujukan dalam pembahasan ini diterbitkan di jurnal *Current Biology* pada 2015. Peneliti mengamati tiga kelompok masyarakat nonindustri, Hadza di Tanzania, San di Namibia, dan Tsimane di Bolivia. Ketiganya hidup dengan akses yang sangat terbatas atau tanpa listrik dan tidak memiliki paparan rutin terhadap cahaya buatan seperti masyarakat perkotaan modern.

Hasilnya cukup mengejutkan. Durasi tidur mereka berada pada kisaran 5,7 hingga 7,1 jam per malam. Waktu antara mulai tidur dan bangun memang lebih panjang, sekitar 6,9 hingga 8,5 jam, tetapi waktu tidur aktual tidak otomatis mencapai delapan jam. Penelitian tersebut juga menemukan pola tidur yang erat berkaitan dengan lingkungan.

Ketiga kelompok cenderung mulai tidur beberapa jam setelah matahari terbenam dan bangun sebelum matahari terbit. Suhu lingkungan ternyata menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan waktu tidur. Mereka cenderung tertidur ketika suhu

mulai turun dan terbangun ketika suhu berada pada titik yang lebih rendah menjelang pagi.

Jadi Apa 6 Jam Sudah Cukup?

Jawabannya adalah belum tentu. Di sinilah penting membedakan antara temuan tentang pola tidur alami manusia dengan rekomendasi kesehatan untuk masyarakat saat ini.

American Academy of Sleep Medicine (AASM) dan Sleep Research Society merekomendasikan orang dewasa berusia 18-60 tahun tidur setidaknya tujuh jam secara teratur untuk mendukung kesehatan optimal. Panel tersebut secara konsensus menilai tidur enam jam atau kurang tidak memadai untuk mendukung kesehatan optimal orang dewasa.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) juga merekomendasikan orang dewasa berusia 18-60 tahun memperoleh sedikitnya tujuh jam tidur per malam. Untuk usia 61-64 tahun, rekomendasinya tujuh hingga sembilan jam, sedangkan orang berusia 65 tahun ke atas disarankan tidur tujuh hingga delapan jam.

Kurang dari 7 Jam Perlu Diwaspadai

Masalahnya, banyak orang merasa telah terbiasa tidur lima atau enam jam. Mereka mungkin tetap dapat bekerja, beraktivitas, dan merasa baik-baik saja. Tetapi kemampuan berfungsi tidak selalu berarti tubuh telah memperoleh tidur yang optimal.

AASM menyebut tidur kurang dari tujuh jam secara rutin berkaitan dengan berbagai dampak kesehatan yang merugikan, termasuk peningkatan risiko kenaikan berat badan dan obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, depresi, serta peningkatan risiko kematian.

CDC juga menekankan bahwa tidur yang cukup bukan hanya berkaitan dengan rasa segar ketika bangun. Tidur berkualitas penting bagi kesehatan fisik dan emosional serta membantu tubuh berfungsi secara normal sepanjang hari.

Kualitas Juga Penting

Ada persoalan lain yang sering luput ketika orang membicarakan "delapan jam tidur". Durasi bukan satu-satunya ukuran kesehatan tidur.

AASM sendiri menjelaskan bahwa kebutuhan tidur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk genetik, perilaku, kondisi medis, lingkungan, serta aspek psikologis dan sosial. Selain durasi, waktu tidur, keteraturan, dan kualitas tidur juga berperan.

Dua orang yang sama-sama berada di tempat tidur selama delapan jam belum tentu memperoleh manfaat yang sama.

Seseorang bisa berada di tempat tidur delapan jam tetapi sering terbangun, sulit mempertahankan tidur, mengalami gangguan pernapasan saat tidur, atau tidur pada jadwal yang terus berubah. (farist/dya)

Teleskop Roman Meluncur, Memburu 100 Ribu Planet

Pada Minggu (30/8/2026), roket Falcon Heavy meninggalkan Kennedy Space Center, Florida. Di dalamnya terdapat Nancy Grace Roman Space Telescope, observatorium generasi baru NASA yang dirancang untuk memperluas pemahaman manusia tentang alam semesta.

Roman meluncur pukul 07.26 waktu setempat dan berhasil memasuki fase perjalanan menuju titik Lagrange 2 (L2), sekitar 1,6 juta kilometer dari Bumi. Observatorium ini diperkirakan membutuhkan sekitar tiga bulan untuk mencapai lokasi tersebut sebelum menjalani proses pengujian dan kalibrasi instrumen. Misi utamanya dirancang berlangsung lima tahun.

Nama Roman diambil dari Nancy Grace Roman, astronom yang menjadi kepala astronom pertama NASA dan salah satu tokoh penting dalam pengembangan program teleskop luar angkasa. Ia dikenal sebagai "Ibu Teleskop Luar Angkasa Hubble".

Meski kerap disebut sebagai penerus Hubble, Roman memiliki karakter berbeda. NASA menyebut bidang pandangnya setidaknya 100 kali lebih luas daripada Hubble. Kemampuan tersebut memungkinkan Roman melakukan survei langit dalam cakupan sangat besar dan berpotensi mengukur cahaya dari sekitar satu miliar galaksi sepanjang masa operasinya.

Salah satu target utama Roman adalah mencari planet di luar Tata Surya atau eksoplanet. NASA memperkirakan teleskop tersebut dapat menemukan lebih dari 100.000

eksoplanet.

Jumlah tersebut tidak berarti seluruhnya merupakan kandidat kehidupan. Sensus itu terutama digunakan untuk mengetahui seberapa umum planet terbentuk dan bagaimana sistem keplanetan tersebut di galaksi.

Roman juga membawa Coronagraph Instrument, instrumen yang dirancang menghalangi cahaya terang dari sebuah bintang sehingga objek yang lebih redup di sekitarnya dapat diamati. Kemampuan tersebut memungkinkan pengamatan langsung terhadap sejumlah eksoplanet dan piringan pembentuk planet.

Dengan demikian, Roman bukan sekadar mencari planet baru. Data yang diperolehnya diharapkan membantu astronom memahami bagaimana sistem keplanetan terbentuk dan berkembang.

Membongkar Misteri Materi Gelap Target lain yang tidak kalah penting adalah materi gelap dan energi gelap.

Materi gelap tidak dapat diamati secara langsung karena tidak memancarkan atau memantulkan cahaya. Keberadaannya diketahui melalui pengaruh gravitasi terhadap materi yang dapat diamati.

Energi gelap digunakan untuk menjelaskan percepatan ekspansi alam semesta, tetapi sifat fisiknya hingga kini belum diketahui secara pasti.

Direktur Rose Center for Earth and Space di American Museum of Natural History, Neil deGrasse Tyson, menyebut keduanya sebagai salah satu misteri terbesar dalam astrofisika



modern.

"Beberapa misteri yang paling lama belum terpecahkan dalam astrofisika modern adalah: Apa sebenarnya hakikat materi gelap dan energi gelap?" ujar Tyson, dikutip NBC News.

"Kita memiliki berbagai gagasan, tetapi kita belum mengetahui wujud sebenarnya dari hal-hal tersebut. Teleskop ini akan berupaya menyediakan data terbaik yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu," lanjutnya.

Roman tidak akan memotret materi gelap secara langsung. Sebaliknya, teleskop ini akan mempelajari pengaruhnya terhadap distribusi dan perkembangan galaksi. Survei terhadap galaksi dalam jumlah sangat besar diharapkan memberikan petunjuk mengenai sifat materi gelap dan energi gelap.

Kemampuan Roman terletak pada kombinasi bidang pandang

yang luas dan pengamatan inframerah. NASA menyebut teleskop tersebut dapat memetakan wilayah langit jauh lebih luas daripada observatorium antariksa sebelumnya.

Data yang dikumpulkan dalam jumlah besar nantinya dapat digunakan untuk berbagai penelitian, termasuk evolusi galaksi, lubang hitam, pembentukan bintang, eksoplanet, serta struktur alam semesta.

Roman juga dirancang sebagai pelengkap, bukan sekadar pengganti Hubble. Hubble memiliki kemampuan pencitraan dengan resolusi tinggi pada bidang pandang yang lebih sempit, sedangkan Roman berfokus pada survei wilayah langit yang jauh lebih luas.

Hasil pengamatan Roman dapat digunakan untuk menemukan objek atau fenomena yang kemudian diteliti lebih detail menggunakan teleskop lain. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDOARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAH I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Pantaloons, Celana Vintage

Tren Musim Panas 2026

Pantaloons kembali muncul di tengah arus tren fesyen musim panas 2026. Celana dengan siluet longgar, ringan, dan kadang dihiasi renda itu menawarkan perpaduan antara kenyamanan, kesan feminin, serta sentuhan vintage.

Popularitasnya tidak lepas dari kebangkitan kembali berbagai gaya lama dalam fesyen. Pada musim panas tahun ini, tren mode memang bergerak ke arah yang lebih ekspresif, dengan warna-warna berani, detail dekoratif, serta berba

gai rujukan gaya masa lalu. Vogue mencatat bahwa tren musim panas 2026 antara lain ditandai dengan busana sheer, aksesoris scarf, sandal terbuka, hingga permainan siluet yang lebih eksperimental.

Di tengah tren tersebut, pantaloons menawarkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih mengandalkan potongan ketat atau struktur yang kaku, item ini mengutamakan siluet longgar yang memberi ruang bergerak. Karakternya yang ringan membuat pantaloons mudah dikenakan saat cuaca panas.

Awalnya Pakaian Dalam

Meski kini tampil sebagai item fesyen, pantaloons memiliki sejarah yang cukup panjang. Dalam sejarah busana, istilah pantaloons atau pantalettes merujuk pada pakaian dalam berbentuk celana yang digunakan perempuan pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19.

Fashion Institute of Technology (FIT) mencatat pantalettes berasal dari Prancis pada awal abad ke-19 dan kemudian menyebar ke Inggris serta Amerika Serikat. Bentuknya menyerupai celana panjang atau legging, umumnya menggunakan linen putih, dan dapat diberi detail berupa lipit, renda, cutwork, maupun bordir.

Pantalettes pada awalnya bukan sekadar aksesoris dekoratif. Celana tersebut digunakan untuk menutup bagian kaki ketika perempuan mengenakan gaun dengan rok yang lebih pendek atau ketika bagian kaki berpotensi terlihat. Pada masa ketika crinoline dan hoop skirt menjadi bagian dari siluet busana perempuan, pantalettes berfungsi sebagai lapisan pelindung sekaligus menjaga kesopanan.

Menariknya, bentuk pakaian ini pada awal kemunculannya memang berbeda dengan celana modern. Beberapa pantalettes bahkan terdiri atas dua bagian yang dikenakan pada masing-masing kaki dan diikat di bagian pinggang. Bahan linen menjadi pilihan karena relatif ringan dan nyaman.

Museum Nevada juga mencatat bahwa pakaian dalam perempuan abad ke-19 hadir dalam berbagai variasi, termasuk drawers, knickers, pantalettes, dan pantaloons. Bentuknya yang longgar berkaitan dengan kebutuhan untuk tetap memungkinkan tubuh bergerak nyaman karena material dan teknologi pakaian saat itu belum mengenal elastisitas seperti sekarang.

Dengan perkembangan mode, istilah pantaloons kemudian memiliki penggunaan yang lebih luas. Dalam sejarah busana laki-laki, pantaloons juga pernah merujuk pada celana panjang ketat yang populer pada awal abad ke-19. FIT mencatat bahwa pantaloons laki-laki pada era tersebut umumnya berpotongan sempit dan memanjang hingga betis atau mata khaki. Karena itu, pantaloons yang kembali populer sekarang lebih tepat dilihat sebagai interpretasi modern

atas berbagai bentuk celana vintage dan pakaian dalam historis, bukan sekadar menghidupkan kembali satu model celana dari masa lalu.

Kembalinya gaya tersebut ke lemari pakaian modern juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh selebritas dan fashion influencer.

Nyaman dan Terkesan Effortless

Ada alasan praktis mengapa pantaloons menarik perhatian ketika suhu meningkat. Potongannya yang lebar membuat celana tidak terlalu melekat pada tubuh. Dengan material yang ringan dan breathable, terutama linen atau kain tipis lainnya, model seperti ini lebih nyaman digunakan dalam kondisi panas.

Selain nyaman, siluet longgar juga memberikan keleluasaan bergerak. Karakter tersebut membuat pantaloons dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari berjalan-jalan, berlibur, hingga sekadar menikmati suasana santai.

Daya tarik lainnya terletak pada tampilannya. Pantaloons dapat menghadirkan kesan effortless, seolah pemakainya tidak berusaha terlalu keras untuk terlihat modis. Pada saat bersamaan, detail renda, potongan mengembang, atau material semi-transparan dapat memberikan sentuhan romantis dan feminin.

Tren ini juga sejalan dengan pergeseran mode 2026 yang tidak lagi sepenuhnya terpaku pada estetika minimalis. Vogue mencatat bahwa musim panas tahun ini justru memperlihatkan kebangkitan gaya yang lebih ekspresif dan personal. (far,ist/dya)



Kopdes Belum Semua Jalan, ...dari Hal 1

Pemerintah menyiapkan Rp40 triliun untuk membayar angsuran pokok dan bunga pembiayaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang mulai jatuh tempo pada September 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana tersebut telah disiapkan sejak awal tahun. Sumber pembayaran yang disebut pemerintah berasal dari pos Dana Desa.

Purbaya menyampaikan kepastian itu dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis (3/9/2026). Ia mengatakan pembayaran pertama akan jatuh tempo pada 27-28 September. "Kita sudah sediakan uang Rp40 triliun, sudah siap dari awal tahun itu, untuk membayar cicilan dan bunganya," kata Purbaya. Pemerintah, menurut dia, memastikan kewajiban tersebut dibayar agar tidak mengganggu kondisi perbankan.

Meski demikian, Rp40 triliun yang disiapkan bukan berarti seluruhnya otomatis dicairkan pada September. Purbaya mengatakan pembayaran tetap menunggu proses audit dan verifikasi atas pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi. Kewajiban yang telah memenuhi persyaratan akan diproses, sementara bagian yang belum selesai diverifikasi tidak serta-merta dibayarkan.

Angka Rp40 triliun tersebut berkaitan dengan skala pembiayaan pembangunan Kopdes yang diperkirakan mencapai sekitar Rp240 triliun. Pemerintah sebelumnya menyebut pembiayaan itu disiapkan untuk pembangunan lebih dari 80 ribu koperasi dengan nilai sekitar Rp3 miliar per unit. Dengan tenor enam tahun, kebutuhan pembayaran pokok secara kasar berada di kisaran Rp40 triliun per tahun, di luar bunga.

Namun, istilah "utang Kopdes" perlu dibaca secara hati-hati. Dalam skema yang berlaku saat ini, kredit perbankan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDMP/KKMP diberikan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Hal itu berbeda dengan skema sebelumnya yang mengatur pinjaman langsung kepada pengurus koperasi. Perubahan mekanisme tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026.

PMK 15/2026 yang mulai berlaku 1 April 2026 secara khusus mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa untuk membayar kewajiban yang timbul dari percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDMP/KKMP. Regulasi itu diterbitkan

sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Dengan demikian, keterlibatan Dana Desa dalam pembayaran pembiayaan Kopdes bukan keputusan yang baru muncul ketika cicilan jatuh tempo. Mekanismenya sudah memiliki landasan regulasi sejak April. PMK 15/2026 bahkan mencabut PMK 49/2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Kopdes serta PMK 63/2025 mengenai dukungan pemerintah kepada bank penyalur pinjaman Kopdes.

Dalam perkembangan sebelumnya, Purbaya juga telah mengungkapkan bahwa sebagian pembiayaan pembangunan Kopdes sebesar Rp240 triliun akan dicicil menggunakan Dana Desa yang dialihkan untuk program tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 pada Agustus lalu.

Skema ini menempatkan Dana Desa dalam posisi penting untuk memenuhi kewajiban pembiayaan pembangunan Kopdes. Pada saat yang sama, Dana Desa merupakan instrumen transfer yang penggunaannya berkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa. Karena itu, penggunaan sebagian Dana Desa untuk membayar kewajiban pembiayaan program Kopdes membuka pertanyaan mengenai ruang fiskal yang tersisa bagi kebutuhan desa lainnya.

Pemerintah beralasan mekanisme pembayaran telah disiapkan dan tidak akan menimbulkan keterlambatan kepada perbankan. Purbaya menegaskan pemerintah memiliki dana untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jaminan itu sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pembiayaan yang disalurkan melalui bank-bank Himbara tetap berjalan dan tidak berubah menjadi persoalan di sektor perbankan.

Persoalannya, pembayaran cicilan pertama baru memasuki tahap awal dari skema pembiayaan enam tahun. Jika total pembiayaan mencapai sekitar Rp240 triliun, kewajiban pokok secara kasar berada di kisaran Rp40 triliun setiap tahun sebelum memperhitungkan bunga. Artinya, kebutuhan pembayaran bukan hanya persoalan September 2026, melainkan kewajiban yang akan berulang dalam beberapa tahun mendatang.

Cicilan pertama pada September menjadi ujian awal bagi skema tersebut. Pemerintah memastikan dana tersedia, sementara pembayaran tetap menunggu audit dan verifikasi. Setelah itu, persoalan yang lebih panjang adalah memastikan pembiayaan ratusan triliun rupiah tersebut menghasilkan

aktivitas ekonomi yang mampu menopang keberlanjutan Kopdes--tanpa membuat ruang fiskal desa semakin sempit.

Kritik DPR

Komisi VI DPR RI mempertanyakan kesiapan KDKMP yang dinilai belum sepenuhnya beroperasi, tetapi sudah mulai dibebani kewajiban pembayaran cicilan. Persoalan tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan saat mencecar Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengenai perkembangan program KDKMP.

Zulfikar menyebut hampir 50 persen koperasi belum memperoleh permodalan. Di sisi lain, sebagian koperasi disebut sudah harus membayar cicilan, termasuk melalui Dana Desa, meski kegiatan operasionalnya belum berjalan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pencairan pembiayaan dengan kesiapan koperasi menjalankan usaha.

"Sementara operasional mereka belum berjalan, sudah nyicil. Ibarat orang sudah ambil mobil kredit, mobilnya belum datang, tapi sudah harus dibayarkan," ujar Zulfikar.

Menurut Zulfikar, persoalan utama yang harus segera dibereskan pemerintah adalah permodalan. Koperasi tidak akan mampu menjalankan fungsi ekonomi apabila fasilitas pembiayaan belum tersedia, sementara kewajiban pembayaran sudah berjalan. Karena itu, pemerintah diminta memastikan mekanisme pembiayaan tidak justru membebani koperasi yang belum memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan.

Kritik DPR tersebut juga menyentuh fungsi KDKMP. Zulfikar meminta koperasi tidak berhenti sebagai tempat penjualan sembako. Koperasi desa, menurut dia, semestinya dikembangkan sebagai agregator produk ekonomi masyarakat desa, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan.

Produk-produk tersebut selanjutnya dapat dihimpun melalui koperasi untuk disalurkan kepada Perum Bulog. Dengan pola tersebut, KDKMP tidak hanya menjadi saluran distribusi barang kebutuhan pokok, tetapi juga mempunyai fungsi memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar bagi produk yang dihasilkan masyarakat desa.

Dorongan DPR itu sekaligus menempatkan persoalan modal sebagai ujian awal program KDKMP. Pembentukan koperasi dalam jumlah besar tidak otomatis membuatnya menjadi badan usaha yang produktif. Koperasi membutuhkan modal, kepastian model bisnis, akses pasar, serta kemampuan mengelola usaha agar dapat menghasilkan pendapatan untuk membiayai operasional

JUMLAH KREDIT DAN PEMBIAYAAN YANG DISALURKAN OLEH HIMBARA

(Rp Triliun)

Bank Mandiri	1.801,93	1.592,03
Bank BRI	1.381,40	1.416,76*
BNI	863,67	931,25
BTN	385,26	402,91
BSI**	303,99	309,90*
KET	31 Des 2025	30 Jun 2026

* Data per 31 Maret 2026.

** Terdiri dari piutang murabahah dan ijarah, pinjaman qardh, pembiayaan mudarabah dan musyarakah.

sekaligus memenuhi kewajibannya.

Di sisi lain, penempatan 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih belum juga dimulai. Kementerian Koperasi menyebut proses tersebut masih menunggu surat keputusan (SK) penempatan dari Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), meski pendidikan bagi para calon manajer telah rampung.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan para calon manajer telah menyelesaikan pendidikan dan kini tinggal menunggu proses penempatan. Menurut dia, BP BUMN sedang menyiapkan penempatan para manajer di titik-titik Kopdes yang secara fisik telah siap beroperasi.

"Pendidikan ini kan baru selesai nih ya, lalu kita rencana untuk penempatan. Nah, penempatan ini sedang disiapkan oleh BP BUMN untuk nanti penempatan para manajer nanti di lokasi-lokasi yang sudah siap operasionalnya," kata Zabadi di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2026).

Persoalan kewenangan menjadi salah satu alasan proses penempatan belum berjalan. Para manajer Kopdes Merah Putih nantinya berstatus sebagai pegawai BUMN, bukan pegawai Kementerian Koperasi. Karena itu, penerbitan SK penempatan menjadi kewenangan BP BUMN. "SK-nya kan penempatan dari mereka [BP BUMN]," ujar Zabadi.

Penempatan juga tidak menunggu seluruh titik Kopdes selesai dibangun. Zabadi mengatakan pembangunan fisik telah berlangsung di lebih dari 36.000 titik. Dari jumlah tersebut, manajer akan ditempatkan secara bertahap di lokasi yang telah memenuhi syarat fisik untuk mulai beroperasi. (wid,ist,kum/dya)



DPRD DAN PEMPROV JATIM SEPAKATI P-APBD 2026, BERIKUT CATATAN FRAKSI

SURABAYA - DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur me-nyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (3/9/2026).

Ketua DPRD Jatim Musyafak Ro'uf mengungkapkan, Perda P-APBD 2026 yang telah disepakati harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur.

"Perda ini nantinya yang kita sepakati harus dapat memberikan dampak dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur. Tentunya juga melalui kolaborasi masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan di Jawa Timur," ungkap Musyafak.

Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan perubahan anggaran tahun berjalan. Namun, sejumlah fraksi memberikan catatan agar perubahan postur APBD tidak berhenti pada penambahan angka anggaran, melainkan diikuti kesiapan pelaksanaan dan capaian program yang terukur.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, mencatat belanja daerah dalam P-APBD 2026 meningkat Rp2,67 triliun, dari Rp27,22 triliun menjadi Rp29,90 triliun. Kenaikan tersebut antara lain disertai tambahan belanja modal yang setelah pembahasan berada di kisaran Rp866 miliar.

PKS menilai peningkatan belanja perlu diikuti kesiapan pelaksanaan. Fraksi tersebut juga menyoroti penggunaan SiLPA 2025 sebesar Rp3,38 triliun sebagai sumber pembiayaan. Menurut PKS, SiLPA perlu dilihat tidak hanya sebagai hasil efisiensi, tetapi juga sebagai indikator yang perlu dievaluasi apabila muncul karena program tidak terlaksana atau proses pengadaan yang terlambat.

"Menambah anggaran harus menambah manfaat. Besarnya tambahan anggaran harus diikuti



dengan kesiapan pelaksanaan yang memadai, sehingga tidak sekadar meningkatkan angka belanja, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," ujar Harisandi.

PKS juga memberikan catatan terhadap pemerataan pembangunan. Alokasi infrastruktur Bina Marga untuk wilayah Madura disebut masih berada di kisaran 5 persen. Sementara tambahan anggaran Dinas PU Bina Marga sekitar Rp922,54 miliar dinilai perlu diterjemahkan dalam capaian konkret, mulai dari peningkatan kondisi jalan, konektivitas antarwilayah hingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sektor pemberdayaan ekonomi, PKS mencermati tambahan anggaran Program Kredit Sejahtera (Prokesra) sekitar Rp19,02 miliar. Program tersebut, menurut PKS, perlu diukur melalui pertumbuhan usaha, peningkatan omzet, penciptaan

lapangan kerja, dan kenaikan kelas UMKM.

Sementara itu, Fraksi PAN melalui juru bicara Abdullah Abu Bakar menyoroti pelaksanaan hibah. Hingga 19 Agustus 2026, realisasi hibah disebut baru mencapai 34,05 persen, dengan 88 hibah bermasalah senilai Rp24,21 miliar.

PAN meminta hibah yang tidak siap atau berpotensi tidak terealisasi dievaluasi sehingga anggarannya dapat diarahkan pada program yang lebih prioritas.

"Ukuran keberhasilan APBD bukanlah seberapa besar anggaran dapat dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan," kata Abdullah Abu Bakar.

Lebih lanjut, Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso menekankan agar penggunaan SiLPA dalam P-APBD 2026 diarahkan pada program yang siap dilaksanakan dan memberikan

dampak langsung. Gerindra mengingatkan agar tambahan ruang fiskal tidak kembali menjadi sisa anggaran pada akhir tahun.

"Pemanfaatan SiLPA dapat diterima sepanjang diarahkan pada program yang siap dilaksanakan, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak nyata. Tambahan ruang fiskal tidak boleh kembali menjadi sisa anggaran pada akhir tahun," ujarnya.

Selain persoalan belanja dan SiLPA, fraksi juga memberikan perhatian terhadap sejumlah sektor strategis. PKS mencatat anggaran Dinas Pendidikan justru turun sekitar Rp104,49 miliar dalam P-APBD 2026. Di sisi lain, terdapat tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2025 bagi 35.680 ASN guru SMA, SMK, dan SLB dengan nilai sekitar Rp274,57 miliar.

Pada sektor BUMD, total dividen yang diterima Pemprov Jatim tercatat meningkat 4,44 persen. Bank Jatim menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 85,27 persen dari total dividen, disusul sejumlah BUMD lainnya.

Musyafak menegaskan, pelaksanaan Perda tersebut selanjutnya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen di Jawa Timur menjadi bagian penting agar kebijakan anggaran yang telah disepakati dapat diterjemahkan dalam program pembangunan.

"Tentunya, masyarakat Jawa Timur dan seluruh elemen pemerintahan harus berkolaborasi dan bergotong royong," pungkasnya.(adv,pra/dya)



Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar



Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso



Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari